

# Mempercepat Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Mengantisipasi Tantangan Masa Depan Pekerjaan

Oleh: TIM PENELITI SMERU

Penelitian ini berangkat dari visi SMERU yang mendukung pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dalam konteks transformasi digital.

1

Transformasi digital perlu digunakan untuk membantu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.

2

Kebijakan perlu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi akibat transformasi digital dan inovasi.

# Target transformasi digital RPJMN 2020-2024 bukan *"low hanging apple"*.

	Kondisi 2021	Target 2024
Cakupan desa dengan internet 4G	<b>74%</b> (61.926 desa)	<b>95%</b>
Penetrasi internet	<b>62%</b> (155 juta penduduk)	<b>82%</b>

Sumber: Podes 2021 & Susenas 2021.

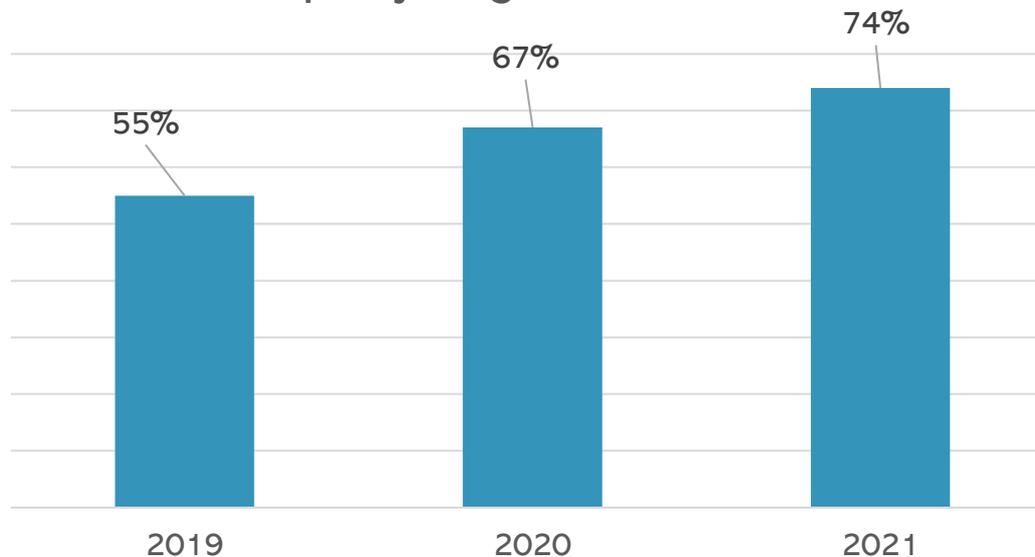
---

Lalu, apakah target ini dapat dicapai?

---

# Pandemi mendorong pertumbuhan konektivitas.

Cakupan jaringan 4G nasional



Sumber: Podes 2018-2021.

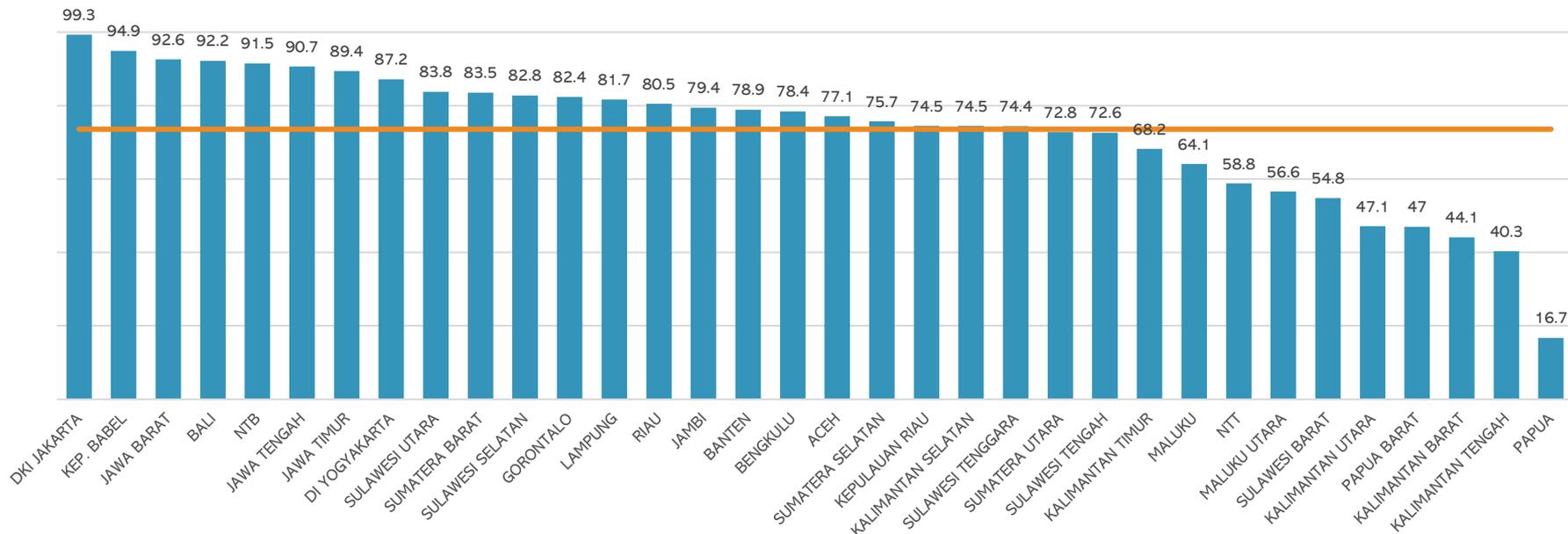
---

Namun, ada empat persoalan mendasar yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan transformasi digital.

---

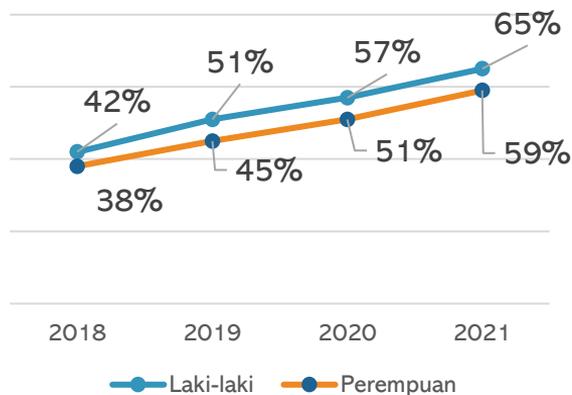
# Wilayah timur Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital.

Cakupan jaringan 4G per provinsi (dalam %)

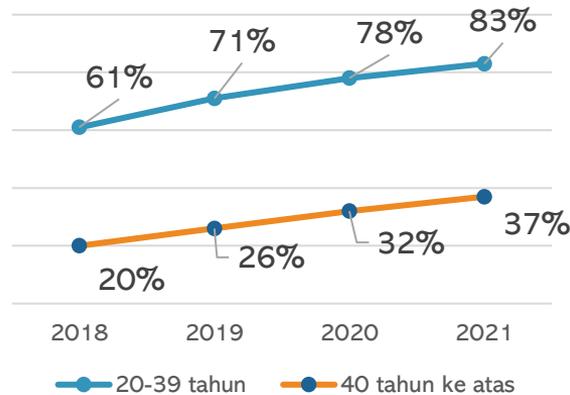


Dengan peningkatan konektivitas, belum terlihat laju peningkatan akses pada kelompok yang kurang terlayani.

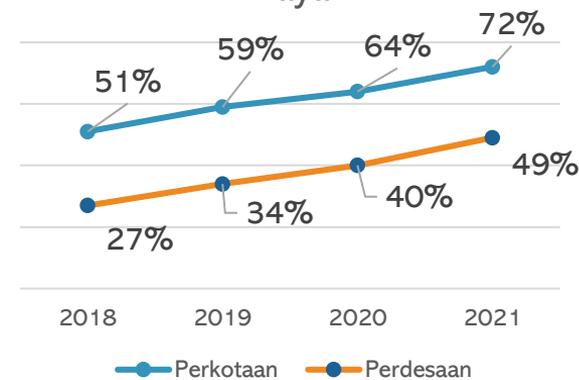
Berdasarkan jenis kelamin



Berdasarkan kelompok usia



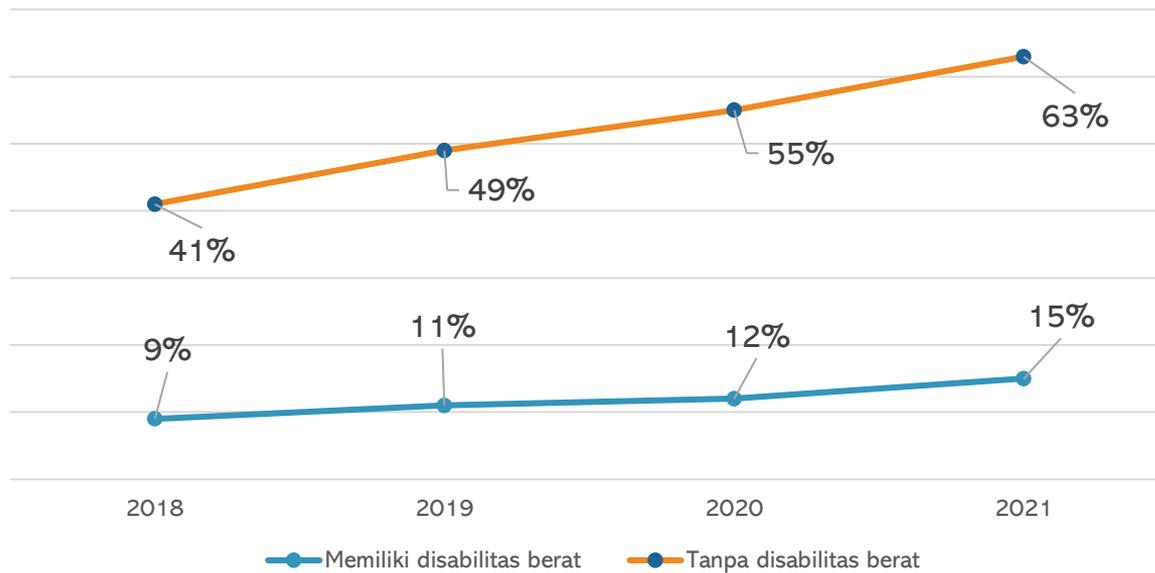
Berdasarkan klasifikasi wilayah



Sumber: Susenas 2018-2021.

# Kesenjangan akses justru semakin nyata terlihat bagi warga penyandang disabilitas.

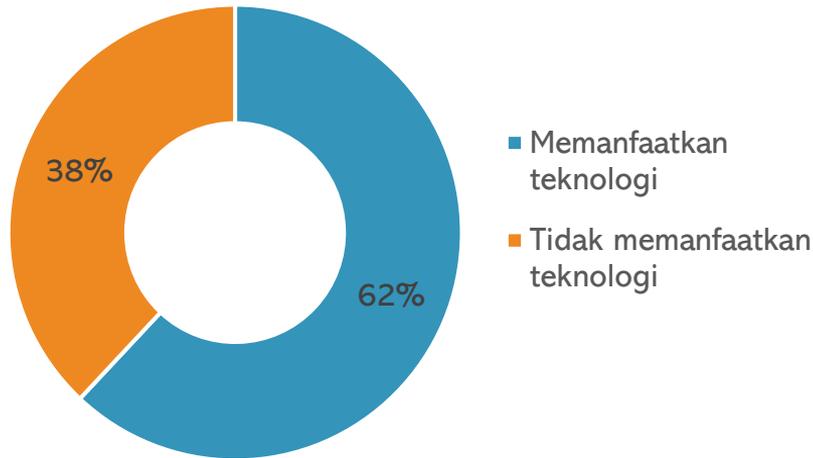
Berdasarkan status disabilitas berat



Sumber: Susenas 2018-2021.

# Kemitraan menjadi mekanisme pekerjaan berbasis digital saat ini, namun pengaturannya belum optimal.

Pemanfaatan teknologi oleh *gig worker* saat bekerja



Sumber: Sakernas 2019

**Aplikasi:** cross-sectoral, flexible, dan cepat.

**Regulasi:** belum sepenuhnya bisa mengatur layanan dan hubungan pekerjaan digital.

**Hubungan antar lembaga yang berwenang:** belum mengimbangi/merespon dengan koordinasi terstruktur.

Tata kelola membutuhkan data yang akurat dan tepat waktu. Namun itu belum tersedia lengkap saat ini.

1

Sumber data, terutama data yang dikumpulkan secara berkala, masih terbatas.

2

Survei berkala masih terbatas pada Susenas, Sakernas, dan Podes.

Pekerja ekonomi *gig* masih cenderung tak terlindungi dan terpapar pada berbagai risiko dalam pekerjaan.



Jamsos yang Disediakan Pemberi Kerja	Kondisi 2018	Kondisi 2021
Kepesertaan jaminan sosial pekerja formal	39.5%	41%
Kepesertaan jaminan sosial pekerja informal	1.1%	1.6%

Sumber: Sakernas 2018 & 2021.

Agar target RPJMN dan SDGs tercapai, prinsip **inklusivitas** dan **berkeadilan** harus menjadi pilar utama transformasi digital.

---

Lalu, apa yang perlu dilakukan agar transformasi digital menjadi inklusif dan berkeadilan



# Inklusivitas dimulai dengan mewacanakan internet sebagai hak sipil



## Insentif & Efisiensi Pengadaan

- Memberikan insentif bagi penyedia layanan internet di daerah 3T.
- Mendukung efisiensi & kolaborasi antaroperator dalam menurunkan harga layanan internet.

## Afirmatif dan Tepat Sasaran

- Program literasi digital yang afirmatif dan desain yang inklusif bagi warga miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia.

# Berkeadilan bisa dicapai dengan memastikan perlindungan bagi pekerja ekonomi *gig*



## Perbaiki Tata Kelola

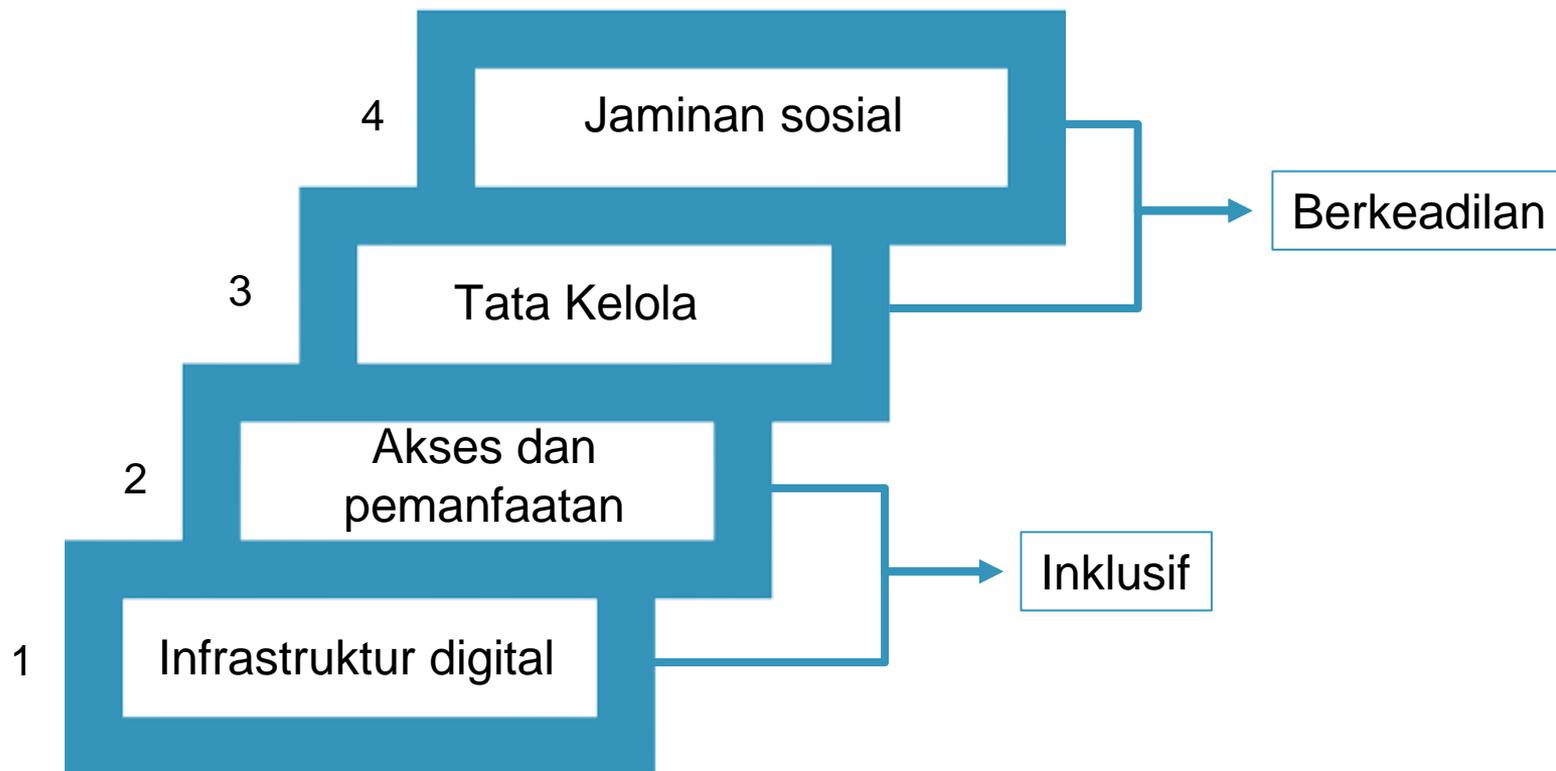
- Mekanisme kelembagaan, misal koordinasi terstruktur antar lembaga yang relevan, bisa menjadi respon pertama dalam memperbaiki tata kelola terhadap kemitraan dan pekerjaan berbasis digital lainnya.



## Lakukan Kampanye, Promosi, dan Edukasi Skema Perlindungan

- Promosi dan komunikasi publik perlu lebih digencarkan.
- Perlu ada edukasi tentang pentingnya perlindungan dalam bekerja (JKK, JKM).
- Perlu ada inovasi skema perlindungan.

# Transformasi Digital yang Inklusif dan Berkeadilan



# Terima kasih



smeru.or.id



smeru@smeru.or.id



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



@smeru.institute